

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT

Dwi Handayani

*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Widya Mandala Madiun*

ABSTRACT

The quality of auditing is the main focus of auditor 's work in order to discover and report any breach in the accounting system of client's company. It is determined by both competency and independency.

The determinants of auditing quality in public sector are (1) the length of time which an auditor has spent to audit client's company, (2) the number of client's company audited by an auditor, (3) the size and financial condition of client's company audited, (4) auditor's work reviewed by the third party, (5) auditor's independency, (6) the level of auditing fee, and (7) the planning of auditing quality. The characteristics of auditing quality improvement include (1) the level of education, (2) professionalism, (3) the understanding on internal controlling structure of client's company, (4) the planning of auditing team, and (5) auditing performance of VFM.

Keywords: *auditing quality, competency, independency*

A. Pendahuluan

Kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independent semakin meluas. Hal ini menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan oleh pihak yang membutuhkan. Untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, sebaiknya para akuntan publik memiliki pengetahuan audit yang memadai serta dilengkapi dengan pemahaman mengenai kode etik profesi.

Akuntan publik melaksanakan audit menurut ketentuan yang ada pada standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Publik. Standar *auditing* yang ada meliputi 1) standar umum, 2) standar pekerjaan lapangan, dan 3) standar pelaporan. Standar umum berkaitan dengan persyaratan *auditor* dan mutu pekerjaannya. Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan kriteria dan ukuran mutu kinerja akuntan publik dalam melakukan pekerjaan lapangan. Standar pelaporan berkaitan dengan criteria dan ukuran mutu kinerja akuntan publik dalam melakukan pelaporan (IAI, 2001).

Dalam bidang *auditing*, jasa yang diberikan oleh akuntan publik adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat (opini) apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh IAI. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik akan dipakai oleh pihak-pihak yang berkepentingan (pimpinan perusahaan, investor, pemerintah, karyawan, dan masyarakat) dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, audit harus dilakukan dengan baik. Sebagai hasil auditnya, akuntan publik memberikan

pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan. Pendapat akuntan publik ini disajikan dalam "Laporan Auditor Independen".

Menurut Jones dan Pendlebury (1996) pemakai informasi keuangan unit pemerintah dapat dibedakan menjadi

1. *Governing bodies*
2. *Investors and creditors*
3. *Resources providers*
4. *Oversight bodies*
5. *Constituents*

Pada sektor publik pemeriksaan dilakukan oleh BPKP atau akuntan publik yang ditunjuk oleh BPKP, yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu : "setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya".

B. Kompetensi dan Independensi

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi dan independensi. Menurut AAA *Financial Accounting Standard Committee* (2000),

good quality audits require both competence (expertise) and independence. These qualities have direct effect on actual audit quality, as well as potential interactive effects. In addition financial statement user's perception of audit quality are a function of their perceptions of both auditor independence and expertise.

1. Kompetensi

Kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil pendidikan formal, ujian profesional, maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, dan simposium (Ida, 2005).

Kompetensi berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang memadai yang dimiliki oleh akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktek audit (Yulius, 2002). Auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup, mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Seorang auditor junior agar mencapai kompetensi, harus memperoleh profesionalnya dengan mendapatkan supervisi yang kompeten dan *review* atas pekerjaannya dari yang lebih berpengalaman. Seorang auditor harus mengikuti perkembangan yang terjadi, terutama perkembangan ilmu akuntansi, auditing, dan bisnis. Auditor harus mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Yulius, 2002).

Kompetensi auditor diukur melalui banyaknya ijasah atau sertifikat yang dimiliki serta banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar atau simposium. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar/symposium diharapkan auditor akan semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya (Ida, 2005).

2. Independensi

Independensi auditor merupakan suatu hal yang penting yang sudah sejak lama menjadi pembicaraan di kalangan praktisi, akademisi dan pembuat kebijakan, karena pendapat yang diberikan oleh auditor sangat mempengaruhi banyak pihak, misalnya pemerintah, investor, pengamat ekonomi, masyarakat, manager, dan serikat buruh.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pihak yang mempunyai kompetensi mengatur dan mengawasi kegiatan auditor di Indonesia juga memberikan aturan yang berkaitan dengan independensi, kejujuran, dan objektivitas *auditor* dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada Standar Auditing (SA) seksi 220, independensi auditor artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum, sehingga tidak boleh memihak kepada kepentingan siapapun.

C. Kualitas Audit pada Akuntan Publik

Kualitas audit adalah proporsional seorang akuntan dalam menemukan dan melaporkan terjadinya suatu penyelewengan yang terjadi di perusahaan klien. Untuk menemukan penyelewengan ini diperlukan pengalaman, pendidikan, profesional, dan struktur audit perusahaan. Selain itu juga tergantung pada independensi akuntan.

Pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) kualitas akuntan di tentukan oleh mutu profesional, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit, dan penyusunan laporan auditor. SPAP meliputi:

1. Standar Umum: akuntan harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, independensi dalam sikap mental dan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pelaksanaan: Akuntan harus melakukan perencanaan dan supervisi audit, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern dan bukti audit kompeten yang cukup.
3. Standar Pelaporan: Akuntan dalam membuat laporan tentang pernyataan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

D. Auditing pada Sektor Publik

Akuntan Sektor Publik hampir sama dengan Akuntan Publik, perbedaannya terletak pada klien. Akuntan Sektor Publik kliennya adalah pemerintahan, sehingga ada pengaruh politik negara yang bersangkutan dan kebijaksanaan pemerintahan. Tujuan adanya audit pada sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sebagai konsekuensi adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam penggunaan dana baik dari pusat maupun dana dari pendapatan asli daerah.

Supaya pelaksanaan pengelolaan dana masyarakat yang diamanatkan tersebut transparan dengan memperhatikan nilai uang yaitu menjamin dikelola dana dari masyarakat tersebut dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, maka diperlukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Sektor Publik.

Pelaksanaan audit ini bertujuan untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Malan *et al.* (1984), pemeriksaan pada sektor publik dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Financial and Compliance* yang bertujuan untuk menentukan apakah operasi keuangan dijalankan dengan baik, apakah pelaporan keuangan suatu organisasi disajikan secara wajar, dan apakah organisasi tersebut telah mentaati hukum dan peraturan yang sudah ada.
2. *Economy and efficiency* untuk menentukan apakah organisasi tersebut telah mengelola sumber-sumber dana secara ekonomis, efisien, dan efektif termasuk sistem informasi manajemen, prosedur administrasi atau struktur organisasi yang cukup.
3. *Program result* tujuannya untuk menentukan apakah hasil yang diinginkan atau keuntungan telah dicapai pada kos yang rendah.

Ketiga hal tersebut dilakukan oleh akuntan dalam melakukan pemeriksaan untuk mencapai kualitas yang baik.

Value for Money (VFM) audit menurut Mardiasmo (2000) merupakan ekspresi pelaksanaan lembaga sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen dasar yaitu:

1. Ekonomi yang artinya pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang termurah. Ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dengan *output value*.
2. Efisiensi yang artinya tercapainya *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output* atau *output* yang berkaitan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas yang artinya menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *result*.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Penelitian yang dilakukan oleh Deis dan Giroux (1992) yang melakukan investigasi tentang determinan dari kualitas audit oleh *Independent CPA firm* di Texas pada *audits of Independent School district*. Hasil penelitian tersebut menemukan *Quality Control Review (QCR)* yang diperoleh melalui pengukuran langsung secara relatif atas kualitas audit, serta menjelaskan adanya 4 hipotesis yang menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu:

1. *Tenure* adalah lamanya waktu auditor tersebut dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu unit usaha/perusahaan atau instansi. Semakin lama seorang akuntan telah melakukan audit, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah. Karena akuntan menjadi kurang memiliki tantangan dan

prosedur audit yang dilakukan kurang inovatif atau mungkin gagal untuk mempertahankan sikap profesional skepticism.

2. Jumlah klien. Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik. Karena akuntan dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga nama baik atau reputasinya.
3. Ukuran dan kesehatan keuangan perusahaan klien. Semakin sehat keuangan perusahaan klien maka kemungkinan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan akuntan untuk tidak mengikuti standar yang berlaku umum. Kemampuan akuntan untuk bertahan dari tekanan klien tergantung pada kontrak ekonomi lingkungan dan gambaran perilaku akuntan termasuk di dalamnya a) pernyataan etika profesional, b) kemungkinan untuk dapat mendeteksi kualitas yang buruk, c) figur dan visibilitas untuk mempertahankan profesi, d) Akuntan menjadi anggota komunitas profesional, e) tingkat interaksi auditor dengan kelompok *Professional Peer groups*, dan f) Norma Internasional profesi akuntan.
4. Kualitas audit akan meningkat jika akuntan tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga.

Menurut De Angelo (1981), kualitas audit sebagai probabilitas auditor untuk menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi perusahaan klien. Ukuran perusahaan audit menurut Deis dan Giroux (1992) ditentukan oleh jumlah klien dan persentase dari *audit fee* dalam usaha untuk mempertahankan kliennya agar tidak berpindah pada KAP lain. Beberapa penelitian tentang hubungan kualitas audit dengan ukuran perusahaan audit adalah sebagai berikut :

1. De Angelo (1981) berargumentasi bahwa kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien. Perusahaan audit yang besar yaitu perusahaan audit dengan jumlah klien yang paling banyak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan audit yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya dan jika terjadi maka akan mengalami kerugian yang besar.
2. Shockley (1981) mengidentifikasi bahwa persepsi dari *independent auditor* secara signifikan berbeda antara perusahaan audit yang besar dengan yang kecil.
3. Lennox (1999) menyatakan bahwa perusahaan audit yang besar lebih mampu menangkap *signal* penyelewengan keuangan yang terjadi dan mengungkapkannya dalam pendapat audit mereka.
4. Dye (1993) menyatakan bahwa auditor yang mempunyai aset yang lebih besar menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dibandingkan dengan auditor yang mempunyai aset yang lebih kecil.

F. Meningkatkan Kualitas Audit.

Kualitas audit dinilai melalui sejumlah unit standarisasi dari bukti audit yang diperoleh akuntan eksternal dan kegagalan audit akan dinyatakan sebagai

kegagalan akuntan independen untuk mendeteksi suatu kesalahan material. Untuk meningkatkan kualitas audit maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesional untuk tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi karena akuntan melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, sehingga akuntan tidak dibenarkan memihak pada kepentingan golongan.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit, akuntan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, artinya akuntan dalam mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan semestinya. Penerapan yang cermat dan seksama diwujudkan dengan melakukan *review* secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya, kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit di lapangan.
5. Memahami struktur pengendalian intern klien untuk dapat melakukan perencanaan audit, menentukan sifat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan laporan keuangan yang telah disusun oleh klien telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau tidak. Dalam pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus memadai, jika tidak harus dinyatakan dalam laporan keuangan auditan.
8. Di bidang sektor publik melakukan VFM audit yaitu melakukan audit kinerja meliputi:
 - a. Ekonomi dan efisiensi yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu perusahaan telah memperoleh dan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan mematuhi aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efisiensi.
 - b. Audit program yang mencakup penentuan pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh UU, penentuan efektivitas kegiatan bisnis, pelaksanaan program, kegiatan perusahaan, dan penentuan apakah perusahaan yang diperiksa telah mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

G. Kesimpulan

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa yang diberikan akuntan publik akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya. Kualitas audit ditentukan oleh beberapa karakteristik yaitu independensi, kompetensi, lamanya bekerja, jumlah klien, kesehatan keuangan klien, adanya pihak independen yang *mereview* laporan keuangan, dan perencanaan audit.

Untuk meningkatkan kualitas audit yaitu dengan pendidikan profesionalnya, mempertahankan independensi dalam sikap mental, kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya, memahami struktur pengendalian intern klien, bukti audit yang cukup dan kompeten dan melakukan VFM audit.

DAFTAR PUSTAKA

- AAA Financial Accounting Standar Committee. 2000. Comentary: SEC Auditor Independence requirements. *Accounting orizons*. 15 (4): 443-452.
- De Angelo L,E, 1981. Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting & economic*. 3 (5): 113-127.
- Deis, Donald R. Jr and Gary A. Giroux.1992. Determinant of Audit Quality in the Public Sector .*The Accounting Review*. 67 (3): 135-150.
- Dye. R. 1993. Auditing Standart, Legal Liability and Auditor Wealth. *Journal of political Econom*. 101 (3): 887-914.
- Ida Suraida. 2005. Pengaruh Etika, kompetensi, Pengalaman Audit dan resiko Audit terhadap Skeptissime professional Auditor dan Ketepatan pemberian opini Akuntan public. *Jurnal Sosiohumaniora*. 7 (3): 187-202.
- Ikatan Akuntan Publik (IAI). 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta Salemba Empat.
- Jones, Rowan and Pendlebury. 1996. *Public Sector Accounting*, 4th edition.. London. Pitman Publishing
- Lennox S, Clive. 1999. Audit Quality & Auditor Size : An Evaluation of Reputation and Deep Pockets Hypothese. *Journal of Business Finance & Accounting*. 26 (7): 779-806.
- Malan R. M, James R. Fountain & Robert L. Lockridge. 1984. *Performance Auditing in Local Government*. Chicago. Illinois, Governmant Finance Officers Assocation.
- Mardiasmo. 2000. Value for Money Audit dalam Pelaksanaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Akuntabilitas Publik.Bahan Seminar Strategi Pemeriksaan Keuangan Daerah yang Ekonomis, Efisien dan Efektif dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Yogyakarta.
- Shockley, R.A,1981. Perceptions of Audit Independence: A Conceptual Model. *Journal of Accounting, Auditing & Finance* . 56 (10): 785-800.
- Yulius Jogi Christiawan. 2002. Kompetensi dan Independensi Akuntan publik Refleksi Hasil Penelitian Empiris. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan..* 4. (2): 79-92.